

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Edisi Khusus

BUTON, BUTENG, BUSEL, BUTUR, WAKATOBI, MUNA, MUBAR, KOLAKA
BOMBANA, KENDARI, BAUBAU

Baubau Post

Baubaupost.com

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

SENIN
11 November 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Propam Polda Sultra Periksa Guru Supriyani Soal Uang Kapolsek Dan Kanit



Guru honorer SD Negeri 4 Baito Supriyani bersiap menjalani persidangan di ruang sidang Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

Laporan: Mashuri, Baubau Post, Durasi Times

SULTRA-Penyidik Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Tenggara meminta keterangan guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani terkait perkara Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito menerima uang Rp 2 juta dari terdakwa kasus kekerasan anak polisi di Konawe Selatan.

Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi Hadiri Rakor Persiapan dan Kesiapan Pilkada Serentak



Laporan: Ardi

KENDARI, BP-Dalam upaya menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024,

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan dan kesiapan Pilkada

Serentak tahun 2022 se-Sultra yang berlangsung di ruang pola Kantor Gubernur Sultra pada

Lanjutkan ke Hal: 7

Tito Minta Kepala Daerah Dukung Program Prioritas Prabowo



Mendagri Tito Karnavian meminta para kepala daerah dan jajarannya mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto lima tahun ke depan

Pewarta: Hadi

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah dan jajarannya mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto lima tahun ke depan.

Tito menyampaikan hal itu saat mengumpulkan

kepala daerah, kapolda, pangdam, kabinda, dan pimpinan lembaga daerah di Sentul hari ini.

“Hal ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan pemerintah daerah dan forkopimda serta instansi vertikal di daerah guna mendukung program

Lanjutkan ke Hal: 7

“Iya benar, Ibu Supriyani kemarin dimintai keterangan di Propam Polda Sultra,” kata Ka-

Lanjutkan ke Hal: 7

Gandeng Kemenpan-RB, Pemprov. Sultra Laksanakan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Kabupaten dan Kota se Sultra



Pewarta: Mashuri

KENDARI, BP-Adanya perubahan nomenklatur Kementerian maka

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk melakukan rapat koordinasi

Lanjutkan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post
(www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi
per Tanggal 30 Desember 2022



Propam Polda Sultra Periksa Guru Supriyani Soal Uang Kapolsek Dan Kanit

bid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Kristian, Kamis (7/11).

Dalam perkara tersebut, kata Iis, penyidik Propam telah memeriksa Kapolsek Baito Ipda Muh Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aipda Amiruddin yang diduga menerima uang Rp 2 juta dari Supriyani agar tidak ditahan saat menangani kasus kekerasan terhadap anak Intelkam Polsek Baito Aipda Wibowo Hasyim.

“Jadi tim internal sudah mengambil

beberapa keterangan sudah dikumpulkan. Selanjutnya propam melakukan pemeriksaan kode etik untuk kapolsek dan kanit reskrim. Ibu Supriyani ini hanya jadi saksi dalam pemeriksaan kode etiknya,” ungkapnya.

Sementara ini, kata Iis, penyidik Propam Polda Sultra masih melakukan pendalaman keterangan dari semua pihak-pihak terkait, termasuk keterangan dari Supriyani yang telah menjalani pemeriksaan.

“Kalau sementara

ini terperiksa masih melakukan pemeriksaan kode etik terkait permintaan uang (Rp2 juta) itu. Kemarin masih diperiksa,” ujar Iis.

Sebelumnya, penasihat hukum Supriyani membeberkan sejumlah pihak yang meminta uang ke-

pada guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani dalam perkara dugaan kekerasan terhadap anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, melalui permintaan uang damai Rp 50 juta

hingga uang sebesar Rp 15 juta untuk tidak ditahan.

Kapolsek Baito, Ipda Muh Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aipda Amiruddin diduga menerima uang Rp 2 juta dari Supriyani agar tidak ditahan.

“Ada juga Rp2 juta yang diberikan ke kapolsek agar (Supriyani) tidak ditahan di kepolisian, itu diberikan oleh ibu Supriyani melalui pak desa,” kata Andre Darmawan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/10). (*)

Tito Minta Kepala Daerah Dukung Program Prioritas Prabowo

prioritas serta arah kebijakan Bapak Presiden lima tahun ke depan,” kata Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di SICC, Bogor, Kamis (7/11).

Tito mengatakan peran pemerintah daerah sangat krusial dalam kemajuan Indonesia. Dia berkata sekitar Rp1.200 triliun dari APBN beredar di pemerintah daerah.

Prabowo Lantik Anggota Kompolnas, Ada Budi Gunawan hingga Choirul Anam

Dia berharap Prabowo memberi pengarahannya kepada para kepala daerah dalam

kesempatan itu. Menurutnya, arahan itu penting agar pembangunan di daerah sejalan dengan visi dan misi pemerintah pusat.

“Saya harapkan dari agenda ini ada arahan dari pemerintah pusat, khususnya dari Bapak, yang akan menjadi pedoman bagi kepala daerah dan jajaran forkopimda dan pimpinan instansi,” ujarnya.

Kemensos Usulkan 16 Tokoh Jadi Calon Pahlawan Nasional Tahun 2024

Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dihadiri 5.360 orang

pejabat. Jumlah itu terdiri dari kepala daerah, pejabat eselon I pemerintah pusat, kapolda, pangdam, kepala kejaksaan tinggi, ketua KPU daerah, dan ketua Bawaslu daerah.

Para pejabat itu akan diberi pengarahannya langsung oleh Prabowo. Mereka juga akan menerima pemaparan teknis dari tujuh menteri koordinator terkait kebijakan lima tahun ke depan. Acara akan ditutup sore hari dengan arahan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (*)

Gandeng Kemenpan-RB, Pemprov. Sultra Laksanakan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Kabupaten dan Kota se Sultra

evaluasi daerah lingkup kelembagaan perangkat pemerintah daerah lingkup pemerintah, baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota se-Sultra, yang dimulai sejak Kamis (7/11/2024), bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra.

Atas nama Pj. Gubernur, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D membuka secara resmi rakor tersebut, sekaligus memberikan ucapan selamat datang kepada para tim dan rombongan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, khususnya Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata-laksana, termasuk para Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Lingkup Pemprov Sultra, para Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kota se Sultra, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Sekda Sultra mengatakan, rapat koordinasi evaluasi daerah lingkup kelembagaan perangkat pemerintah daerah lingkup provinsi, kabupaten, dan kota se Sultra tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah.

“Kami mengucapkan selamat datang di Bumi Anoa Provinsi Sultra kepada Pak Mulyanto., S. Kom yang mewakili Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB sekaligus sebagai ketua tim evaluasi, beserta Pak Yoga Indra Kemala., S.H, dan ibu Erna Zuanita., S.Si., M.M selaku anggota tim evaluasi, semoga kesehatan senantiasa menyertai bapak dan ibu tim evaluasi kelembagaan selama berada di sini, sampai kembali ke Jakarta

dan berkumpul bersama keluarga serta melanjutkan aktivitas seperti sedia kala,” tutur Sekda Sultra menyambut.

Dia melanjutkan, terkait kegiatan kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tentu dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Selanjutnya, unsur pelaksana yang diwadahi dalam bentuk dinas daerah, dan unsur penunjang yang diwadahi dalam badan daerah.

Selain itu, lanjutnya, pada daerah kabupaten dan kota dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan, untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

“Pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran, sehingga menghasilkan perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien,” katanya lagi.

Menurutnya, secara ideal, struktur organisasi perangkat daerah harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari daerah adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik harus mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Lebih lanjut dia menjelaskan, proses organisasi merupakan gambaran seluruh aktivitas organisasi yang dilaksanakan untuk menciptakan dan memelihara rantai nilai atau value chain secara dinamis. Dengan demikian, setiap aktivitas dan interaksi antara elemen organisasi, harus selaras satu sama lain selama proses organisasi.

“Oleh karena itulah evaluasi

kelembagaan menjadi cara tepat untuk mengetahui apakah organisasi saat ini telah sesuai atau belum dengan tantangan yang ada. Terlebih, Kementerian PAN-RB telah menetapkan pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah,” paparnya.

Sekda Sultra menearangkan, jika peraturan menteri ini menjadi sebuah landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

“Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 tahun 2018, bahwa evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. Evaluasi kelembagaan ini mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur organisasi dan proses organisasi. Gambaran dari dimensi pokok organisasi ini akan

Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi Hadiri Rakor Persiapan dan Kesiapan Pilkada Serentak

Rabu (6/11/2024). Rapat koordinasi yang dihadiri oleh Forkompinda Sultra dan Bupati/Wali Kota se Sultra dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Sultra Komjen (Pol) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, SIK, MH.

Kehadiran Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si pada Rakor tersebut menunjukkan komitmen dalam memastikan suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak di wilayah Penyelenggaraan Pemerintah Kota Baubau. “Kami akan memberikan dukungan penuh dan berkoordinasi

dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan Pilkada 2024 di Kota Baubau berjalan lancar, aman, dan demokratis,” ujar Dr H Muh Rasman.

Ditambahkan, Rakor tersebut telah menjadi acuan atau kebijakan terkait langkah yang kemudian akan dilakukan oleh Pemkot Baubau khususnya pada desk Pemilu Kota Baubau.

Pj Wali Kota Baubau menekankan pentingnya peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan baik. Sebab, keberhasilan Pilkada 2024 di Kota

Baubau tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh komponen masyarakat. Oleh sebab itu, dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemkot Baubau maka pihaknya yakin Pilkada 2024 di Kota Baubau akan berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis sesuai dengan harapan seluruh masyarakat.

Pada kesempatan rakor tersebut, ketua KPU Sultra juga Dr Asril, S.Sos, M.Si juga memaparkan materi terkait persiapan dan kesiapan Pilkada Serentak tahun 2024 di Sultra. (*)

menjadi bahan pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja perangkat daerah,” terangnya.

Sekda Sutra menuturkan, berkeinginan dengan hal-hal dimaksud, maka pada kesempatan tersebut telah hadir tim evaluasi Kelembagaan Kementerian PAN-RB, yang dipimpin oleh Bapak Mulyanto S Kom untuk memberikan arahan maupun petunjuk

teknis dalam penyelenggaraan evaluasi kelembagaan perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah.

“Oleh karena itu, untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan, saya mengharapkan kepada seluruh peserta rapat koordinasi evaluasi kelembagaan perangkat daerah untuk mengikuti dengan seksama serta memanfaatkan pertemuan hari ini dengan sebaik-baiknya dan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan serta ditanyakan terkait dengan evaluasi kelembagaan perangkat daerah, agar dapat disampaikan,” pesannya. (*)

Prabowo Pergi ke 5 Negara: Sikap RI Sangat Ditunggu Banyak Pihak



Presiden Prabowo Subianto melakukan serangkaian kunjungan ke lima negara, yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris selama kurang lebih dua pekan. Ia memulai kunjungan perdana ke China pada hari ini, Jumat (8/11)

Laporan: Hadi

JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto melakukan serangkaian kunjungan ke lima negara, yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris selama kurang lebih dua pekan. Ia memulai kunjungan perdana ke China pada hari ini, Jumat (8/11).

Prabowo menyebut kedatangannya ke China, AS, dan Inggris untuk memenuhi undangan dari para Presiden dan Perdana Menteri. Sementara kunjungan ke Peru untuk menghadiri KTT APEC, dan lawatan ke Brasil un-

tuk KTT G20.

"Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral," kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (8/11).

Prabowo menilai undangan dari sejumlah negara ini membuktikan bahwa Indonesia dihormati dan memiliki posisi strategis di dunia.

"Membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan, tidak hanya ekonomi tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya

kira peranan Indonesia, sikap Indonesia, sangat ditunggu oleh banyak pihak," ujarnya,

Prabowo mengaku dirinya sudah memberikan bekal dan arahan teknis kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan anak buahnya di Kabinet Merah Putih selama dirinya meninggalkan RI,

"Saya mohon doa restu dan saya percaya Wapres dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Ia juga mewanti-

wanti agar seluruh anak buahnya bekerja sama menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, kongkalikong, korupsi, hingga penggunaan anggaran yang tidak efisien.

"Dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan, katakanlah kampanye ini harus tegas harus berani. Tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik, yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih," ujar Prabowo.(*)

Prabowo Terbitkan Keppres, Tunjuk Gibran Jadi Plt Presiden 16 Hari

JAKARTA-Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Presiden selama Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kenegaraan ke luar negeri.

Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2024 yang diteken oleh Prabowo pada 8 November 2024. Gibran akan menduduki jabatan itu selama 16 hari atau terhitung sejak tanggal 8 sampai 23 November.

"M e n u g a s k a n Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ke-

tentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kenegaraan, dan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris pada tanggal 8 sampai dengan 23 November 2024 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air," demikian bunyi dik-tum kesatu Keppres tersebut yang dikutip pada Sabtu (9/11).

Gibran berwenang menentukan kebijakan baru selanjutnya presiden. Namun, ia wajib berkonsultasi dengan Prabowo sebelum mengeluarkan kebi-

jakan tersebut.

Tugas-tugas presiden akan dikembalikan kepada Prabowo saat ia tiba di Indonesia. Sementara Gibran berke-wajiban melaporkan pelaksanaan tugas selama memangku jabatan Plt. presiden. "Setelah Presiden berada kembali di tanah air, penugasan berakhir dan Wakil Presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Presiden," bunyi Keppres tersebut.

Presiden RI Prabowo Subianto saat bertemu Presiden China Xi Jin Ping di Beijing, Sabtu (9/10). (AFP/FLOR-ENCE LO)

S e b e l u m n y a ,

Presiden Prabowo melakukan lawatan ke lima negara yakni China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris selama kurang lebih dua minggu.

Kunjungannya ke China, AS, dan Inggris untuk memenuhi undangan dari para kepala negara. Sementara kunjungan ke Peru adalah untuk menghadiri KTT APEC dan lawatan ke Brasil untuk KTT G20.

Prabowo menitipkan pemerintahan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Prabowo mengatakan undangan yang ditujukan ke RI membuktikan

Gibran Usul Kepala Daerah Digembleng di Akmil 5 Hari



Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berbaju loreng saat berkegiatan di Akademi Militer (Akmil), Lembah Gunung Tidar, Magelang

Laporan: Husni

J A K A R T A - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengusulkan agar para kepala daerah digembleng selama lima hari di Akademi Militer (Akmil), Magelang.

Gibran mengatakan perlu kerja sama tim untuk mengelola pemerintahan. Menurutnya, pengembangan di Akmil Magelang bisa jadi cara mengompakkan pemerintah daerah.

"Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan rakornya kita geser saja ke Akmil Magelang," kata Gibran pada Rapat Koordinasi Nasi-

onal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di SICC, Sentul, Bogor, Kamis (7/11).

Rakornas itu menghadirkan semua jajaran pimpinan daerah atau Forkopimda se-Indonesia dari mulai kepala daerah, pimpinan polisi, dan lainnya.

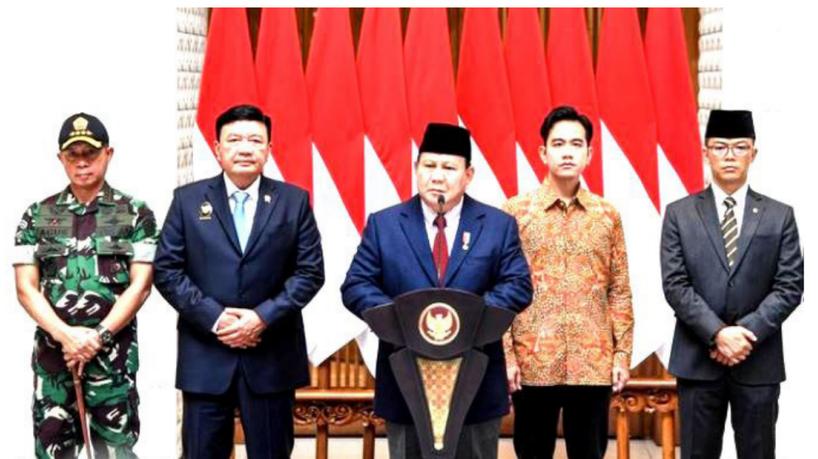
"Mungkin kepala-kepala daerah ini bisa lima hari. Penting ini bapak, ibu, biar semua sinergi satu visi, satu misi untuk Indonesia emas," ujarnya.

Sebelumnya, seluruh anggota kabinet pemerintahan Presiden RI Prabowo Subiantodan Wapres Gibran juga digembleng di Akmil, Magelang beberapa waktu lalu.

Gibran mengingatkan semua elemen pemerintah harus sukseskan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Dia mengingatkan tidak boleh ada visi dan misi selain itu.

Anak sulung Presiden ketujuh RI Jokowi itu mengajak semua kepala daerah untuk kompak mendukung program-program prioritas Prabowo.

"Sekali lagi, Bapak, Ibu, saya garis-bawahi tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo, tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo," ucapnya.(*)



Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Keppres yang menunjuk Wapres Gibran Rakabuming sebagai Plt Presiden selama kunjungan kerja ke luar negeri.

bahwa Indonesia dihormati dan memiliki posisi strategis di mata dunia.

"Indonesia dirasakan perlu untuk

diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral. Membicarakan masalah-masalah yang

sangat penting bagi keadaan, tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik yang penuh ketegangan," kata Prabowo beberapa waktu lalu.(*)

Hadiri Rapat Koordinasi Nasional, Pj. Gubernur : Kami Siap Implementasikan Asta Cita di Sulawesi Tenggara



SULTRA, BP-Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, turut hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Kamis (7/11/2024).

Rakornas ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan turut dihadiri oleh para Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tingkat I dan Tingkat II dari seluruh Indonesia.

Dengan mengusung tema "Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045," Rakornas ini bertujuan menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan program-program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo.

Mengawali Rakornas ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dalam laporannya mengungkapkan bahwa Rakornas kali ini dihadiri oleh lebih dari 5.000 peserta, termasuk jajaran Kementerian, Lembaga Negara, serta Forkopimda dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo me-

nyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakornas ini sebagai kesempatan perdana untuk berdialog langsung dengan Kepala Daerah dari seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa "Ini adalah momen pertama saya berbicara langsung dengan seluruh pengambilan keputusan di republik kita. Kesempatan ini sangat strategis dan penting untuk membangun sinergi nasional demi kemajuan bersama," tegas Presiden RI.

Presiden Prabowo Subianto dalam arahnya menegaskan, "Kita harus bersih dan efisien. Dalam hal ini melakukan penghematan dalam penggunaan APBN dan APBD, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan benar-benar melayani rakyat."

Lebih lanjut, Prabowo meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bertindak tegas tanpa ragu dalam penegakan hukum.

"Saya perintahkan kepada TNI, Polri, dan Kejaksaan agar tidak ragu dalam melakukan penegakan hukum, ciptakan pemerintahan yang bersih serta memaksimalkan upaya penyelamatan uang negara," tegasnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan arahan tentang berbagai program prioritas yang akan men-

jadi fokus pemerintahan dalam lima tahun mendatang, termasuk program makan bergizi gratis, ketahanan pangan dan energi, serta hilirisasi.

Sebelumnya pada sesi pagi, peserta Rakornas menerima arahan dari sejumlah Menteri Koordinator yang menyampaikan kebijakan strategis dalam bidang masing-masing. Dalam panel ini para narasumber sepakat untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi, memastikan kepastian hukum yang berkeadilan, serta melaksanakan arahan Presiden yang menekankan perencanaan APBN dan APBD efektif.

Pada sesi diskusi panel kedua menguraikan peran pemerintah daerah dalam pembangunan SDM yang berkolaborasi antara pemerintah pusat-daerah melalui pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan peningkatan produktivitas daerah serta pemberdayaan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan dukungan untuk UMKM digital untuk terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.

Dalam sesi diskusi panel berikutnya membahas program unggulan pemerintah, para narasumber bersepakat, pemerintah daerah hendaknya memaksimalkan pendapatan asli daerah melalui hilirisasi dan pemberdayaan energi

sumber daya mineral.

Lebih lanjut diskusi panel keempat, yang menyoroti stabilitas politik, hukum, dan keamanan menuju hari pemungutan suara Pilkada serentak 2024, untuk fokus pada pengawalan pemilu yang aman serta memitigasi potensi konflik, dan membentuk desk Pilkada di daerah untuk memastikan kelancaran proses pemilihan.

Menutup Rakornas, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, mengungkapkan agar peserta Rakornas patuh kepada visi dan program Presiden.

"Sekali lagi Bapak Ibu saya garis bawahi tidak ada visi lain selain visi bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo," kata Gibran.

Dalam kesempatannya, Pj. Gubernur menyampaikan apresiasi arahan Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah.

"Kami di Sulawesi Tenggara siap menjalankan arahan Presiden, khususnya dalam upaya efisiensi anggaran, pemberantasan korupsi, serta memperkuat pemerintahan yang bersih dan melayani," ujar Andap.

Ia juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sultra akan menindaklanjuti instruksi terkait opti-

Kontingen Sulawesi Tenggara Siap Berkompetisi di MTQ VII Korpri Nasional di Palangkaraya



Pewarta: Amran

PALANGKARAYA- Kontingen Sulawesi Tenggara hadir dengan penuh semangat untuk berkompetisi dalam ajang Mu-sabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) VII Korpri Nasional di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim ini terdiri dari ASN terbaik Sulawesi Tenggara yang akan berkompetisi dalam Cabang tilawah, tartil, Hifzh Al-Qur'an gol. 30 Juz amma, Hifzh Al-Qur'an gol. Surah Al-Baqarah dan 7 surah pilihan, Hifzh Al-Qur'an gol. Surah Ali 'imran dan An-Nisa, Dakwah Al-Qur'an dan Doa, Khath Al-Qur'an (kaligrafi), khotbah Jum'at dan cabang Makalah ilmiah Al-Qur'an, dengan harapan membawa prestasi dan mengharumkan nama daerah.

Pelepasan Khafilah MTQ VII Korpri di Palangkaraya pada tanggal 31 oktober 2024 di pimpin langsung oleh Pak Sekda bertempat di ruang pola kantor Gubernur dengan di hadiri oleh seluruh kontingen MTQ Prov. Sultra dengan di dampingi oleh pengurus

malisasi penggunaan APBD dengan lebih efektif dan akuntabel.

Andap menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung program ketahanan pangan, hilirisasi, serta regulasi pengelolaan perkebunan yang berpihak

Korpri masing-masing Kabupate/Kota.

Koordinator kontingen, Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara, menyatakan bahwa seluruh peserta sudah mempersiapkan diri dengan matang melalui latihan intensif sejak tahap seleksi provinsi. "Kami datang dengan persiapan yang kuat. Semoga MTQ ini menjadi kesempatan bagi ASN Sulawesi Tenggara untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di kancah nasional," katanya.

Pembukaan MTQ ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Gubernur Kalimantan Tengah, Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional Zidan Arif Fakrulloh, serta sejumlah tokoh nasional lainnya. Acara tersebut diharapkan dapat menginspirasi ASN untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam bekerja, sehingga mampu meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

Salah satu peserta tilawah dari kontingen Sulawesi Tenggara, MH. Rustam, mengungkapkan ke-

banggaannya dapat mewakili daerah dalam ajang ini. "Ini kesempatan berharga bagi kami untuk berkompetisi dan bersilaturahmi dengan rekan-rekan se-Indonesia. Kami akan berusaha maksimal untuk memberikan hasil terbaik bagi Sulawesi Tenggara," ujar Rustam.

MTQ Korpri ini akan berlangsung dari tanggal 5 november hingga 09 November dengan berbagai cabang lomba yang dipertandingkan. Para pemenang nantinya akan mendapat penghargaan dan kesempatan untuk mewakili Indonesia di tingkat internasional.

Masyarakat Sulawesi Tenggara memberikan dukungan penuh bagi kontingen mereka, berharap agar para ASN mampu menunjukkan prestasi terbaik dan membawa semangat nilai-nilai Al-Qur'an dalam pelayanan publik. Kehadiran kontingen ini menjadi simbol kebanggaan dan komitmen ASN Sulawesi Tenggara untuk mengutamakan akhlak dan integritas di tengah tuntutan profesi. (*)

pada rakyat.

Program ini akan kami implementasikan secara terarah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Sultra," lanjutnya.

Turut hadir dalam Rakornas, jajaran

Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih, Kepala Daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia, KPU dan Bawaslu pusat maupun daerah serta Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP). (*)

Pj Bupati Busel Parinringi Hadiri Pelantikan Pimpinan DPRD Buton Selatan



Pewarta: Eron

BUSEL, BP-De-wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, resmi melantik ketua dan wakil ketua definitif DPRD untuk periode 2024-2029, di Gedung Wisata di Batauga, Selasa (5/11/2024).

Pada Rapat Paripurna DPRD Buton Selatan tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Buton Selatan,

Parinringi, SE., M.Si menyampaikan harapan agar setelah pengambilan sumpah janji, para pimpinan dapat mengemban amanah dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi. Setelah pengambilan sumpah ini, para pimpinan diharapkan dapat mengemban amanah dengan penuh integritas serta bertanggung jawab, Pimpinan DPRD merupakan penyelenggara dan fungsi yang setara dengan

pemerintah daerah. Oleh karena itu, kita semua memiliki kewajiban untuk men-capai tujuan yang sama, yakni men-ciptakan masyarakat yang sejahtera.

Kerja sama ini diharapkan dapat terwujud pondasi yang kokoh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik. DPRD Kabupaten Buton Selatan

juga diharapkan dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat dengan baik.

Acara pelantikan Ketua DPRD Buton Selatan Dodi Hasri S.Pd (PDI), Wakil Ketua I La Ode Hasruddin, ST (PKB) Wakil Ketua II H. Hasrul Saadi, SE di hadiri oleh Forkopimda, para Ka OPD, Perwakilan pimpinan Vertikal, para Camat, para Kades dan tamu undangan lainnya. (*)

Sekda Buton Asnawi Jamaluddin Tekankan Pentingnya Peran Pemdes



Pewarta: Rahim

BUTON, BP-Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi menekankan pentingnya peran pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan dan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

"Saya anggap penting karena ini ada kiatannya dengan bagaimana perencanaan program desa

sehingga di tahun 2025 para kepala desa telah siap bekerja tidak ada lagi naman-nya keterlambatan," kata Sekda ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa se-Kabupaten Buton yang digelar di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis, 7 November 2024.

Rakor ini dihadiri oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Buton, Kepala Dinas

PMD, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, perwakilan dari seluruh Desa di Kabupaten Buton, serta sejumlah kepala OPD, Camat, dan tokoh masyarakat.

Sekda lebih lanjut mengatakan para stakeholder untuk menyinergikan program pembangunan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa, sehingga tercipta arah pembangunan yang sejalan demi mewujudkan kese-

jahteraan masyarakat desa di Kabupaten Buton.

Rakor tersebut juga membahas sejumlah isu penting terkait tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan dana desa, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Diharapkan, hasil dari rakor ini akan menjadi panduan dan motivasi bagi seluruh kepala desa dan perangkat desa untuk bekerja lebih baik dalam melayani masyarakat.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara peserta rakor dan narasumber dari berbagai OPD, yang memberikan kesempatan bagi para kepala desa untuk menyampaikan aspirasi serta tantangan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan pembangunan desa. (*)

Sekda Buton Lantik Pejabat Administrator, Pengawas dan BPD PAW

Pewarta: Rahim

BUTON, BP-Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Pemerintah Kabupaten Buton sekaligus melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu, bertempat di Aula Kantor Bupati Buton, Jum'at 8 November 2024.

Berdasarkan Keputusan Bupati Buton Nomor 510 tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang pengangkatan dan pelantikan Pejabat Administrator dan pejabat Pengawas lingkup Pemerintah Kabupaten.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik sebagai berikut:

1. Wardiati W S.H.MKM, jabatan lama Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, jabatan baru Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.

2. Lasinani, S.Pd, Jabatan lama Pengawas Sekolah Madya Jabatan baru Sekretaris Dinas Pendidikan, jabatan baru Sekretaris Dinas Pendidikan.

3. Elmi Salma, S.Sos, Jabatan lama Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian Pemberayaan Sumber Daya Manusia, jabatan baru Kabid Pengembangan Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM.

4. Salimudin, S.Ip jabatan lama Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, jabatan baru Kabid Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten.

5. Darma, S.H jabatan lama Kepala Seksi Angkutan pada bidang Lalulintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, jabatan baru Kabid Lalulintas Dishub Kabupaten Buton.

6. Maskur, S.Ip jabatan lama Pengawas Koperasi Ahli Muda, jabatan baru Kabid Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian Kabupaten.

7. Amsiri, S.H Jabatan Lama Kepala Seksi Ketentraman

dan Ketertiban Kantor Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, jabatan baru Sekcam Kapontori.

8. Lahisi, S.P jabatan lama kepala sub bagian umum dan kepegawaian, jabatan baru kepala sub bagian umum dan kepegawaian pada sekretariat badan Riset inovasi daerah Kabupaten Buton.

9. Yamin Saka, S.E jabatan lama Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton, jabatan baru Kasubag Hukum Pol PP Kabupaten Buton.

10. Rahman, S.Ip jabatan lama Pengadministrasi Kepegawaian, Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kantor Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, jabatan baru Kepala UPTD BLK Kabupaten Buton.

11. Tasrun, S.P jabatan lama Pengadministrasi Inspektorat Kabupaten Buton, jabatan baru Kasubag Keuangan Inspektorat Buton.

12. La Ode Herman, S.Ak jabatan lama Analis Perencanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, jabatan baru Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemeliharaan pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah.

13. Musriati, S.Si jabatan lama Penata Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton, jabatan baru Kasubag Pembiayaan pada bidang BPKAD Kabupaten Buton.

14. Sumarni, S.E jabatan lama Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton jabatan baru Kepala Sub Umum Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton

15. La Mande, S.P jabatan lama Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton, jabatan baru Kasi Pemerintahan Umum Kec. Wolowa Kabupaten Buton.

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin S.Pd. M.Si mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Sekda berharap agar semua pejabat melakukan koordi-

nasi dalam melaksanakan tugasnya.

"Semua yang dilantik ini orang yang sudah berpengalaman di bidangnya, jadi selamat bekerja, sekali lagi saya ucapkan selamat," ucapnya.

Sekda menyampaikan beberapa pejabat administrator dan pengawas yang dilantik hari ini yang memang sudah lama kosong dan hari ini hampir semua dilantik.

"Pelantikan hari ini rata-rata mengisi kekosongan. Alhamdulillah hari ini Saya lihat ada beberapa pejabat eselon 3 yang dilantik termasuk yang di DPR mudah-mudahan bisa membantu Pak Sekwan memfasilitasi. apalagi hari ini kita sudah mau persiapan untuk penyusunan anggaran tahun 2025 ini dan bulan ini sudah harus selesai," harap Sekda.

Selain itu Sekda juga menyebut Pelantikan BPD yang dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan para pejabat Eselon 3 dan 4 agar cepat dalam melaksanakan tugas di desa.

"Pelantikan BPD itu harus disegerakan apalagi SK-nya sudah ditandatangani oleh Bupati. Kemarin kita mengundang semua kepala desa dan BPD untuk merencanakan kegiatan tahun 2025, ini tidak boleh terlambat karena ada rangkaian kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan sebelum nya," ujarnya lagi.

Dalam menentukan APBDes kalau memang kelembagaan belum kukuhkan akan terhambat dalam melaksanakan perencanaan di desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu yang dilantik di antaranya :

1. Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton periode 2019-2025.

2. BPD Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton

3. BPD Desa Wolowa Baru Kecamatan Wolowa

4. BPD Desa Dongkaka Kecamatan Pasarwajo

5. BPD Desa Mulia Jaya Kecamatan La salimu Selatan. (*)

Perkuat Industri Farmasi dan Alat Kesehatan Dalam Negeri



Laporan: Husni

JAKARTA-BP-Indonesia memiliki potensi pasar kesehatan yang sangat besar, karena pembelanjaan di sektor kesehatan mencapai Rp 560 triliun sampai Rp 580 triliun setiap tahunnya. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin dalam pembukaan Health Innovation Festival, Jumat (8/11/2024).

Festival yang digelar dari tanggal 7 sampai 9 November 2024 ini mengangkat tema *Leveraging Local Resources: From Nature Nurture The Future*

Singapore 3.000 dolar lebih tinggi. Jadi, kalau dalam 5 atau 10 tahun masyarakat Indonesia usianya mirip, naik seperti Malaysia atau Singapore, otomatis orang Indonesia akan naik belanja kesehatannya," kata Menteri Budi dalam sambutannya pada pembukaan Health Innovation Festival, Jumat (8/11/2024).

Festival yang digelar dari tanggal 7 sampai 9 November 2024 ini mengangkat tema *Leveraging Local Resources: From Nature Nurture The Future*

atau "Membangun Keberlanjutan Inovasi untuk Ketahanan Kesehatan".

Tema festival ini sesuai dengan upaya Kemenkes membangun sistem ketahanan kesehatan Indonesia yang lebih aman dengan mendorong pembangunan industri farmasi, pembangunan alat kesehatan, dan pembangunan industri layanan kesehatan, dilaksanakan di dalam negeri.

Menteri Budi melanjutkan, perusahaan-perusahaan yang ada saat ini akan mengalami kenaikan pendapatan

(revenue) hingga dua kali lipat, seiring dengan peningkatan belanja kesehatan mencapai dua kali lipat dalam 5 hingga 10 tahun mendatang.

Menteri Budi mengatakan Festival Inovasi Kesehatan ini juga menjadi salah satu implementasi dari transformasi kesehatan pilar ketiga, yakni ketahanan sistem kesehatan. Kegiatan tersebut juga menjadi perwujudan sinergitas dari berbagai pemangku kepentingan demi mendukung kemandirian bidang kesehatan. (*)

HKN ke-60, Menkes Kenang dan Beri Penghormatan kepada Pahlawan Kesehatan

Laporan: Yeti

JAKARTA-Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, bersama Wakil Menteri Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono serta seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Kesehatan (Kemenkes), melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, pada Selasa (5/11). Ziarah ini untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berkontribusi dalam memajukan kesehatan di Indonesia.

Ziarah dilakukan dengan mendoakan para pahlawan dan upacara tabur bunga. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60. Prosesi ziarah dimulai pukul 08.00 WIB. Menkes Budi memimpin upacara penghormatan bersama para pejabat dan pegawai Kemenkes.

Menkes Budi mengatakan, ziarah dan upacara tabur bunga ini dilakukan setiap tahun untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional. Di Jakarta, beberapa pahlawan kesehatan dimakamkan di TMP Kalibata, sementara lainnya dimakamkan di lebih dari 20 kota lain di Indonesia.

"Mudah-mudahan bisa diingat jasa-jasa mereka para pahlawan sekaligus terima kasih karena namanya digunakan sebagai nama rumah sakit dan gedung-gedung Kemenkes," ucap Menkes Budi di TMP Kalibata, Selasa (5/11).

Selain Menkes Budi dan Wamenkes Prof. Dante, turut hadir pejabat lain di TMP Kalibata, yaitu Sekretaris Jenderal Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Inspektur Jenderal Murti Utami, Dirjen Kesehatan Masyarakat Maria Endang Sumiwi, Dirjen Pelayanan Kesehatan Azhar Jaya, dan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Lucia Rizka Andalusia.

Usai upacara penghormatan, Menkes Budi dan rombongan langsung menuju makam pahlawan istri Presiden RI ke-3 BJ Habibie, yakni Almh. Asri Ainun Besari Habibie. Adapun makam pahlawan lainnya yang diziarahi pejabat Kemenkes antara lain dr. Johannes Leimena, GA, Prof. Dr. dr. Gerrit A. Siwabessy, dr. Suwardjono Surjaningrat, dr. Hidayat Hardjo Prawito, dr. M. Soerono, Prof. Dr. dr. Sujudi, Prof. Dr. dr. Darwin Karyadi, Drs. Marisi P. Sihombing, H. Adam Malik Batubara, dan Brigjen TNI (Purn) dr. Aloysius Benedictus Mboi, MPH.

Total terdapat 11 pahlawan kesehatan yang dimakamkan di TMP Kalibata. Tak hanya itu, Kemenkes melakukan ziarah dan upacara tabur bunga di Sandiego Hills untuk pahlawan Dr. dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, TPU Pondok Kelapa untuk pahlawan dr. Adhyatma, MPH, dan TPU Al Azhar Kar-

awang untuk pahlawan dr. Achmad Sujudi, Sp.B, MHA.

Ziarah dan upacara tabur bunga juga dilakukan di 25 RS Vertikal Kemenkes:

1. dr. Kariadi
2. dr. Soeradji Tirtonegoro
3. Prof. DR. M. Sardjito, MD, MPH
4. Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
5. Doktor Jacob Bernadus Sitanala
6. dr. Soeharto Heerdjan Sp.KJ
7. Dr. Tadjuddin Chalid, MPH
8. Goenawan Partowidigdo
9. Dr. Rivai Abdullah
10. Prof. dr. I Gesti Ngoerah Gde Ngoerah
11. Dr. Ario Wirawan Salatiga
12. dr. Tjipto Mangoenkoesoemo
13. Dr. Radjiman Wediodiningrat
14. Dr. Marzoeqi Mahdi
15. Dr. Mohammad Djamil, MPH, DPH gelar Datuk Rang-kayo Tuo
16. Fatmawati Soekarno
17. Prof. Dr. Julie Sulianti Saroso, MPH
18. Dr. H. A. Rotinsulu
19. Prof. Dr. R. D. Kandou
20. Dr. (H.C.) Drs. H. Mohammad Hatta
21. Brigadir Jenderal TNI (Purn.) dr. Hasan Sadikin
22. dr. Mohammad Hoesin
23. Prof. Dr. R. Soeharso
24. Dr. Wahidin Sudirohusodo
25. Prof. Dr. Soerojo

Skrining Kesehatan Gratis Berdasarkan Usia, Hadiah Spesial Setiap Hari Ulang Tahun

Laporan: Yeti

JAKARTA-Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan RI akan meluncurkan program skrining kesehatan gratis yang dapat diakses oleh seluruh warga Indonesia pada hari ulang tahunnya mulai tahun 2025. Program ini merupakan hadiah dari negara kepada masyarakat, yang berfokus pada deteksi dini dan pencegahan penyakit sesuai kategori usia.

"Skrining ini adalah hadiah ulang tahun dari negara kepada masyarakat, dilakukan setiap hari ulang tahun untuk memastikan kesehatan terpantau secara dini," ujar Menteri Budi dalam rapat



kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (31/10).

Program ini berbeda dari skrining Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencakup 14 jenis penyakit. Skrining ulang tahun ini dirancang untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit sesuai golongan usia, dengan tujuan meningkatkan efektivitas deteksi dini dan meminimalkan

risiko kematian serta kecacatan.

Kategori Skrining Berdasarkan Golongan Usia:

Skrining Balita: Difokuskan pada deteksi penyakit bawaan lahir seperti hipotiroid kongenital yang, jika teridentifikasi secara dini, dapat diobati untuk mencegah kematian atau kecacatan.

Skrining Remaja (di bawah 18 tahun): Meliputi pemeriksaan

obesitas, diabetes, dan kesehatan gigi. Skrining ini bertujuan mendeteksi masalah kesehatan yang sering muncul pada usia anak hingga remaja.

Skrining Dewasa: Difokuskan pada deteksi dini kanker, termasuk kanker payudara dan serviks, yang merupakan penyebab utama kematian pada wanita di Indonesia, serta kanker prostat pada laki-laki.

Skrining Lansia: Meliputi pemeriksaan alzheimer, osteoporosis, serta kesehatan umum terkait penuaan.

Skrining akan dilakukan di Puskesmas dan sekolah-sekolah sesuai dengan kategori usia yang relevan. Untuk mendukung pendataan, Kemen-

terian Kesehatan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Warga yang berulang tahun cukup mendatangi Puskesmas terdekat dengan membawa identitas, dan petugas akan memverifikasi data berdasarkan

basis data kependudukan untuk mengakses layanan ini.

Dengan program ini, Kementerian Kesehatan berharap masyarakat Indonesia dapat memantau kondisi kesehatannya sejak dini, guna menciptakan generasi yang lebih sehat dan tangguh. (kemkes)

Harian Pagi
Baubau Post
Kritik, Lugas, Independen
Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik
Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post
Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
Redpel : Hengky TA
Korlip : Hengky TA
Redaktur : Alyakin, Kasrun
Reporter : R a h m a n , ,mashuri, Jaya, Azis, , Lisna
Layouter : Ririn
Pracetak : Aditya
Cetak : Jamal
Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan dan Pemasaran : Nabila D.A
Manager Iklan : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :
Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana :
Kepala Biro Sultra :
Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul
Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan
Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Kasus Guru Supriyani Vs Anak Polisi Batal Damai



Pewarta: Alwan

KENDARI, BP-Terdakwa kasus dugaan penganiayaan anak polisi, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban setelah difasilitasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga. Penasehat hukum Supriyani, Andre Darmawan mengatakan, bahwa proses mediasi tersebut kondisi guru SD Negeri 4 Baito tersebut dalam kondisi tertekan.

Benar ada pencabutan damai, karena kondisi Supriyani kemarin merasa tertekan," kata Andre kepada wartawan, Kamis (7/11).

Dalam pertemuan, Supriyani dibawa oleh penasehat hukum Samsuddin menghadiri pertemuan dengan orang tua korban yang difasilitasi oleh Bupati Konawe Selatan yang berlangsung di

rumah jabatannya.

Saat itu, Supriyani mengaku dalam kondisi tertekan untuk menandatangani surat perdamaian tersebut. Namun, Supriyani telah mencabut kesepakatan damai itu tertanggal 6 November kemarin yang ditembuskan ke Pengadilan Negeri Andoolo, jaksa, Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan.

"Dalam konteks hukum itu, tidak boleh ada intervensi, karena sudah berproses. Artinya silahkan kita ikuti proses hukum dan kita lihat hasilnya bagaimana. Kasus ini harus terang, siapa yang salah dan benar. Kasus ini mau terang ya harus lewat putusan pengadilan," jelasnya.

Sampai saat ini, kata Andre guru SD Negeri 4 Baito masih berkeyakinan bahwa dirinya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap

anak didiknya.

"Jadi ibu Supriyani ini masih berkeyakinan penuh, tidak pernah melakukan penganiayaan itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga mempertemukan guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani dengan pihak orang tua anak yang diduga menjadi korban kekerasan.

Proses penyelesaian perkara tersebut berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan dengan dihadiri sejumlah pihak termasuk penasehat hukum terdakwa dan Kapolres Konawe Selatan, Febry Syam.

"Sebagai orang tua, kita selesaikan ini baik-baik. Apalagi kita satu kampung. Mari kita saling memaafkan dan hidup rukun," kata Bupati Konawe Selatan, Selasa (5/11).

Surunuddin men-

gatakan bahwa seharusnya permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak sampai ke proses persidangan.

"Semoga sesuai harapan kita masalah ini segera selesai baik-baik. Namun sekarang kita kembali ke kebijakan hakim soal putusan persidangan nanti. Harapan kami, hakim dapat mempertimbangkan putusannya," ungkapnya.

Surunuddin berharap tidak ada lagi perkara seperti yang dialami oleh guru Supriyani yang harus berhadapan dengan permasalahan hukum.

"Dengan adanya kesepakatan damai ini, pihak korban maupun pihak terdakwa bisa melakukan aktivitas dengan normal dalam halnya Ibu Supriyani bisa kembali mengajar di SDN 4 Baito," pungkasnya. (*)

Kenapa Tersangka AK Bisa Kerja di Komdigi Padahal Tak Lulus Seleksi?

Pewarta: Alwan

JAKARTA- Tersangka kasus judi online inisial AK bisa bekerja di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena Kemkominfo pada saat itu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru agar AK tetap bisa bekerja meski ia tidak lolos seleksi.

Alasan itu terungkap berdasar hasil pendalaman penyidik Polda Metro Jaya dalam pengembangan kasus judi

online di Komdigi.

"Ternyata terdapat SOP baru yang memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Kementerian Komdigi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indra di dalam konferensi pers, Rabu (6/11).

Ade Ary mengatakan saat ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum tengah mendalami proses pem-

entukan SOP yang membuat AK tetap bisa bekerja.

Termasuk soal dugaan adanya keterlibatan pihak tertentu yang membuat SOP baru agar AK dapat bekerja di Komdigi dan mengelola situs judi online.

"Terkait temuan ini masih terus dilakukan pendalaman," tuturnya.

Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang untuk me-

nutup situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dari 15 tersangka ini, 11 di antaranya merupakan pegawai Komdigi. Sementara tiga diantaranya merupakan AK, AJ, dan A yang bertugas mengendalikan operasional 'kantor satelit'.

AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten

Kapolri Ungkap Modus Baru Bandar Judi Online: Bayar Lewat Kripto



Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan modus-modus baru yang dilakukan oleh para bandar judi online untuk memikat masyarakat menjadi korban

Laporan: Hadi

JAKARTA-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan modus-modus baru yang dilakukan oleh para bandar judi online untuk memikat masyarakat menjadi korban.

Sigit menyebut beberapa modus yang sudah dilakukan para bandar judi yakni dengan menurunkan biaya taruhan hingga menerima pembayaran lewat mata uang kripto.

Hal tersebut disampaikan Sigit dalam paparannya di acarapisah sambut Komisiner Kompolnas periode 2024-2028 di PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (8/11) malam.

Ia menyebut saat ini para bandar judi online sudah mulai mengubah strategi dengan menempatkan uang hasil judi di luar negeri. Hal

itu, kata dia, terjadi setelah pihak kepolisian mulai gencar melakukan penindakan kepada sindikat judi online.

"Para pelaku judi online ini selalu mengubah strateginya, yang tadinya ada di dalam negeri sekarang bergeser ke luar negeri," jelasnya.

"Yang tadinya menggunakan alat bayar dengan rekening, saat ini terus bergeser menggunakan portal yang lebih canggih, payment gateway, dan saat ini sudah bergeser menggunakan crypto," imbuhnya.

Di sisi lain, ia mengatakan untuk menarik lebih banyak korban para bandar judi juga sudah mulai menurunkan biaya taruhan hingga Rp10 ribu. Akibatnya, Sigit mengatakan banyak anak-anak yang ikut menjadi korban judi online.

"Bahkan informasi terakhir, mereka menggeser dari yang tadinya tarifnya Rp100 ribu ke atas, sekarang diturunkan ke Rp10 ribu, sehingga kemudian anak-anak remaja pun ikut terdampak," tuturnya.

Lebih lanjut, Sigit menambahkan saat ini pihaknya terus melakukan langkah pencegahan dan penindakan terkait kasus judi online termasuk dengan menggandeng stakeholder terkait untuk melakukan penindakan.

"Tentunya kita harus berani, tegas, dan saya kira ini adalah bagian dari upaya kita untuk menyelamatkan bangsa kita, uang yang keluar, dan kemudian banyak masalah sosial yang muncul karena masalah judi online," ujarnya. (*)



negatif yang bersifat terbatas di Kementerian Komdigi pada 2023. Namun, ia dinyatakan tak lulus seleksi.

Meski tak lulus, ternyata AK tetap dipekerjakan di Kementerian Komdigi. Bahkan, AK mendapat kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi online.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya menyebut penyidik masih mendalami alasan AK tetap dipekerjakan di Kementerian Komdigi padahal tak lulus dalam proses seleksi.

Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi sementara itu menegaskan dirinya mendukung proses

penegakan hukum kasus judi online yang kini menjerat bekas 11 anak buahnya di Kominfo tersebut.

"Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia. Jangan kasih kendur," kata Budi di kompleks parlemen, Rabu (6/11). (*)

1



CALON BUPATI
SYARASWATI

CALON WAKIL BUPATI
Drs. H. RASYID
MANGURA, M.H.

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

VISI

MEWUJUDKAN KABUPATEN BUTON YANG MANDIRI, MAJU, DAN BERDAYA SAING MELALUI OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

MISI

1. MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING.
2. MENDORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.
3. MEMAJUKAN SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DENGAN TEKNOLOGI MODERN
4. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
5. MENOPTIMALKAN PARAWISATA BERBASIS SUMBER DAYA ALAM DAN BUDAYA LOKAL
6. MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF

2



CALON BUPATI
Drs. LA BAKRY, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
ARIS MARWAN SAPUTRA,
S.H.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BUTON SEBAGAI KAWASAN BISNIS DAN BUDAYA TERDEPAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045

MISI

1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) SAINS, TEKNOLOGI DAN TATA RUANG KAWASAN.
2. TRANSFORMASI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).
3. KESETARAAN GENDER, PEMULA (GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z) DAN PENYANDANG DISABILITAS.
4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, UMKM DAN INDUSTRI KREATIF
5. REFORMASI BIROKRASI, KESADARAN HUKUM DAN TRANSPORTASI KEBUAKAN PEMERINTAH DAERAH.
6. PERKUAT PENYELARASAN HUBUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN PELESTARIAN BUDAYA.

3



CALON BUPATI
H. LA ODE NAANE

CALON WAKIL BUPATI
H. AKALIM, S.Pd.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG CERDAS, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, MENGHARGAI PERBEDAAN DAN MEMILIKI JIWA GITONG ROYONG

MISI

1. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE, DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING BAGI MASYARAKAT BUTON SMART.
2. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU MENUJU GENERASI BUTON EMAS.
3. MEMBANGUN EKONOMI YANG KREATIF DAN INOVATIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.
4. MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KABUPATEN BUTON YANG CERDAS (BUTON SMART CITY).
5. MENGUATKAN BUDAYA MASYARAKAT YANG SALING MENGHARGAI DAN JIWA GOTONG ROYONG.

4



CALON BUPATI
Drs. BASIRAN, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
LA ODE RAFIUN, S.Pd.,
M.Si.

PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BUTON MAJU, TERCIPTANYA MASYARAKAT BUTON YANG ADIL DAN MAKMUR DI TAMBAI DENGAN MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA KONDISI EKONOMI MASYARAKAT LEBIH BAIK. BUTON BERDAYA SAING, MASYARAKAT BUTON YANG MERILIKI KELINGGULAN KOMPETITIF UNTUK MENGHADAPI PERSAINGAN DI MASA YANG AKAN DATANG MENUJU INDONESIA EMAS 2045-2029

MISI

1. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN MUDA SERTA TERJANGKAU.
3. MEMBANGUN EKONOMI YANG KREATIF DAN INOVATIF DENGAN PERTIMBANGAN DAYA SERAP TENAGA KERJA PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.
4. MENINGKATKAN KETAHANAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BERBAGAI MACAM ANCAMAN DAN GANGGUAN BERLANDASKAN NILAI NILAI FALSAFAH DAN BUDAYA KEBUTONAN DENGAN MENUNJUNG TINGGI NORWA KEAGAMAAN.
5. MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA DASAR YANG PRIORITAS UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA DAERAH MAJU BAIK KUANTITAS MAUPUN KUALITAS
6. MENIMPLEMENTASIKAN ADAT ISTADAT DAN KEBUDAYAAN DAERAH DALAM MENAKIKAN KARASITAS DAERAH.

5



CALON BUPATI
Dr. BERE ALI, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
LAODE MUHAMAD
SUMARLIN BUCHARI, S.E.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BERLIAN MEWUJUDKAN BUTON YANG LEBIH BAIK

MISI

1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI MODAL UTAMA PEMBANGUNAN.
2. PENUMBUHAN INVESTASI SEBAGAI SARANA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA.
3. PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SECARA MERATA.
5. PELAYANAN PUBLIK YANG SEMAKIN EFEKTIF DAN EFISIEN.

6



CALON BUPATI
ALVIN AKAWIJAYA
PUTRA, S.H.

CALON WAKIL BUPATI
SYARIFUDIN SAAFA, S.T.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN (BUTON BERSINAR MAS)

MISI

1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE), SERTA MENDORONG TERCIPTANYA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG RELIGIUS, KONDISIF DAN BERBUDAYA.
2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN MENIAGA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS.
3. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH YANG BERBASIS POTENSI LOKAL, MEMBUKA LAPANGAN KERJA DAN KESEMPATAN BERUSAHA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN.